



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI AMBARWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **756289**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 916.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/63 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/21 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/63 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 499.000.000
4. Tanah Seluas 480 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 44.500.000**

1. MOTOR, HONDA - Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA - Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, VESPA PS - Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA FICO2N2810A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, HONDA 1H02N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 42.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 33.545.232**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.036.545.232
III. HUTANG	Rp.	11.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.025.545.232

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.